



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 104/HUMAS PMK/V/2021

Menko PMK Apresiasi Kecermatan Petugas Penyekatan Mudik di Gerbang Tol Cikupa

CIKUPA (11/5) -- H-2 lebaran, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali turun ke lapangan yakni di Gerbang Tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, guna memastikan kelancaran pelaksanaan penyekatan aktivitas mudik.

Muhadjir mengaku sangat mengapresiasi pengelolaan petugas penyekatan mudik di gerbang tol keluar menuju Merak, Banten, dan sekitarnya tersebut. Menurutnya, cara-cara pemeriksaan yang dilakukan sangat cermat termasuk dalam mengantisipasi kemungkinan pemudik “colongan” yang naik di dalam bis maupun kontainer.

“Saya sore ini langsung melihat on the spot di pintu keluar Cikupa dan pengelolaannya sudah sangat bagus dari aparat, baik Kapolri maupun TNI. Pemeriksaannya juga cermat, cara penyelesaiannya juga bagus sehingga tidak harus ada debat dengan pihak-pihak penumpang yang dicurigai,” ujarnya didampingi Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, serta Dandim 0510/Tigaraksa Letkol Inf Bangun IE Siregar.

Ia menjelaskan bahwa ketika ada pengendara dengan penumpang yang dicurigai, petugas telah memiliki jalur khusus untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara lebih ketat. Apalagi, imbuh Muhadjir, karena Gerbang Tol Cikupa merupakan titik perbatasan dari Jakarta dan sekitarnya menuju kawasan Merak, Banten.

“Karena ini perbatasan jadi banyak mereka yang mau pulang habis bekerja dari Jakarta sehingga sulit memisahkan siapa yang mau pulang siapa yang sebetulnya mau mudik. Karena itu, kecermatan dari petugas sangat penting,” cetus Menko PMK.

Berdasarkan laporan Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, per-Selasa (11/5) hingga pukul 14.00 WIB, total kendaraan yang diputarbalik atau keluar berjumlah 168. Masing-masing terdiri dari kendaraan pribadi sebanyak 120, kendaraan umum sebanyak 38, dan kendaraan barang sebanyak 10.

“Mayoritas mereka diminta putar balik karena memang tidak memiliki kelengkapan surat-surat tugas yang harusnya dibutuhkan. Lalu, kalau untuk kendaraan barang itu karena overload,” jelas Kombes Pol Wahyu kepada Menko PMK. (*)

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**